

CaLK

(CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN DEMAK

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Demak, 31 Desember 2020

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Demak



AKHMAD SUGIHARTO, ST, MT

Pembina Tk. I

NIP. 19730517 199803 1 007

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan

Tujuan pelaporan keuangan OPD adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai :

- a. indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
- b. indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan

Dasar hukum penyusunan laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4246);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Republik Indonesia Lembaran Negara Nomor 4437);
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Republik Indonesia Lembaran Negara Nomor 44987);
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010, perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 - l. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 - m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - n. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - o. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak;

- p. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran dan Pendapatan Daerah Tahun 2020 Kabupaten Demak;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 96 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Daerah Tahun 2019 Kabupaten Demak;
- r. Peraturan Bupati Demak Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pedoman pelaksanaan APBD Tahun 2020 Kabupaten Demak;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Demak;
- t. Peraturan Bupati Demak Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Demak;

1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan OPD

Sistematika penyajian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Sistematika penyajian catatan atas laporan keuangan.

BAB II : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian kinerja APBD menurut bidang, berupa gambaran realisasi pencapaian efektivitas dan efisiensi.

BAB III : KEBIJAKAN AKUNTANSI

BAB IV : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 4.1 Laporan Realisasi Anggaran
- 4.2 Laporan Operasional
- 4.3 Laporan Perubahan Ekuitas
- 4.4 Neraca

BAB V : PENJELASAN ATAS INFORMASI - INFORMASI NON KEUANGAN

Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari Laporan Keuangan

BAB VI : PENUTUP

Memuat uraian penutup Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD

OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak pada tahun anggaran 2020 melaksanakan urusan wajib / pilihan bidang **Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman** dengan capaian kinerja sebagai berikut :

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
4	PENDAPATAN - LRA	150.000.000,00	150.250.000,00	100,17%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	150.000.000,00	150.250.000,00	100,17%
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	150.000.000,00	150.250.000,00	100,17%
4.1.2.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LRA	108.690.250,00	108.900.000,00	100,19%
4.1.2.02.01	Pengambilan/Pengumpulan Sampah dari Sumbernya ke Lokasi Pembuangan Sementara - LRA	108.690.250,00	108.900.000,00	100,19%
4.1.2.10	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA	41.309.750,00	41.350.000,00	100,10%
4.1.2.10.01	Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA	41.309.750,00	41.350.000,00	100,10%
5	BELANJA	64.535.793.998,00	63.164.038.925,00	97,87%
5.1	BELANJA OPERASI	62.076.518.998,00	60.738.823.925,00	97,85%
5.1.1	Belanja Pegawai	8.924.460.390,00	8.330.484.515,00	93,34%
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	4.279.799.498,00	4.074.934.709,00	95,21%
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.081.836.092,00	3.045.870.787,00	98,83%
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	360.032.341,00	330.073.774,00	91,68%
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	132.705.000,00	132.325.000,00	99,71%
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	184.590.000,00	157.880.000,00	85,53%
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	234.054.860,00	196.330.620,00	83,88%
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.348.816,00	4.727.906,00	56,63%
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	305.600,00	48.430,00	15,85%
5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	241.270.537,00	182.518.945,00	75,65%
5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja	8.219.803,00	6.289.820,00	76,52%
5.1.1.01.22	Jaminan Kematian	28.436.449,00	18.869.427,00	66,36%
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.019.650.000,00	1.717.039.806,00	85,02%
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	2.019.650.000,00	1.717.039.806,00	85,02%
5.1.1.07	Belanja Uang Lembur	271.910.000,00	267.160.000,00	98,25%
5.1.1.07.01	Belanja Uang Lembur PNS	122.495.000,00	120.085.000,00	98,03%
5.1.1.07.02	Belanja Uang Lembur Non PNS	149.415.000,00	147.075.000,00	98,43%
5.1.1.09	Belanja Honorarium PNS Lainnya	422.600.000,00	399.950.000,00	94,64%
5.1.1.09.01	Belanja Honorarium PNS Lainnya	422.600.000,00	399.950.000,00	94,64%
5.1.1.10	Honorarium Non PNS Lainnya	1.930.500.892,00	1.871.400.000,00	96,94%
5.1.1.10.01	Honorarium Non PNS Lainnya	1.930.500.892,00	1.871.400.000,00	96,94%
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	53.152.058.608	52.408.339.410	98,60%
5.1.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.041.000	730.540.183	97,40%
5.1.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	242.858.000	241.721.700	97,40%
5.1.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	40.000.000	39.861.000	99,53%
5.1.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	15.000.000	15.000.000	99,65%
5.1.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	220.183.000	218.867.100	100,00%
5.1.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	232.000.000	215.090.383	99,40%
5.1.2.03	Belanja Jasa Kantor	520.964.800	507.192.221	97,36%
5.1.2.03.01	Belanja Telepon	20.000.000	9.256.941	46,28%
5.1.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.000.000	4.950.000	99,00%
5.1.2.03.13	Belanja Jasa Kantor Lainnya	495.964.800	492.985.280	99,40%
5.1.2.04	Belanja Premi Asuransi	19.384.308	13.067.859	67,41%
5.1.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	10.768.896	7.259.812	67,41%
5.1.2.04.03	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	8.615.412	5.808.047	67,41%
5.1.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	300.000.000	283.316.160	94,44%
5.1.2.05.01	Belanja Jasa Service	48.000.000	47.475.000	98,91%
5.1.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	119.825.000	119.822.000	100,00%
5.1.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	108.975.000	108.478.660	99,54%
5.1.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	23.200.000	7.540.500	32,50%

5.1.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	188.271.500,00	181.929.500,00	96,63%
5.1.2.06.01	Belanja Cetak	25.138.000,00	21.646.000,00	86,11%
5.1.2.06.02	Belanja Penggandaan	163.133.500,00	160.283.500,00	98,25%
5.1.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%
5.1.2.07.02	Belanja sewa Gedung/ kantor/ tempat	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%
5.1.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	480.459.000,00	420.680.000,00	87,56%
5.1.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	44.550.000,00	43.735.000,00	98,17%
5.1.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	405.659.000,00	352.705.000,00	86,95%
5.1.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.750.000,00	3.090.000,00	45,78%
5.1.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	23.500.000,00	21.150.000,00	90,00%
5.1.2.13	Belanja Pakaian Kerja	127.317.000,00	119.335.000,00	93,73%
5.1.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	127.317.000,00	119.335.000,00	93,73%
5.1.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	754.666.000,00	453.047.287,00	60,03%
5.1.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	596.300.000,00	325.852.500,00	60,03%
5.1.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	158.366.000,00	127.194.787,00	54,65%
5.1.2.18	Belanja Pemeliharaan	591.955.000,00	580.371.000,00	98,04%
5.1.2.18.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	171.955.000,00	167.580.000,00	97,46%
5.1.2.18.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	99.496.000,00	99,50%
5.1.2.18.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi,dan Jaringan	300.000.000,00	298.445.000,00	0,00%
5.1.2.18.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	20.000.000,00	14.850.000,00	74,25%
5.1.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	690.000.000,00	682.360.700,00	98,89%
5.1.2.19.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	300.000.000,00	297.810.700,00	99,27%
5.1.2.19.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	90.000.000,00	89.200.000,00	99,11%
5.1.2.19.04	Belanja jasa konsultansi teknologi dan sistem informasi	300.000.000,00	295.350.000,00	98,45%
5.1.2.20	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	48.701.000.000,00	48.408.504.500,00	99,40%
5.1.2.20.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	48.701.000.000,00	48.408.504.500,00	99,40%
5.1.2.23	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	25.000.000,00	24.995.000,00	99,98%
5.1.2.23.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	25.000.000,00	24.995.000,00	99,98%
5.2	Belanja Modal	2.459.275.000,00	2.425.215.000	98,62%
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	799.275.000,00	775.820.000,00	97,07%
5.2.2.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	60.000.000,00	59.400.000,00	99,00%
5.2.2.05.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang	60.000.000,00	59.400.000,00	99,00%
5.2.2.11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	12.000.000,00	10.800.000,00	18,00%
5.2.2.11.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal	12.000.000,00	10.800.000,00	18,00%
5.2.2.11.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya	0,00	0,00	0,00%
5.2.2.14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	137.500.000,00	130.910.000,00	95,21%
5.2.2.14.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan kantor	55.500.000,00	52.100.000,00	93,87%
5.2.2.14.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	82.000.000,00	78.810.000	96,11%
5.2.2.15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	165.000.000,00	155.875.000	94,47%
5.2.2.15.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	165.000.000,00	155.875.000	94,47%
5.2.2.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	373.275.000,00	367.765.000,00	98,52%
5.2.2.16.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	206.323.200,00	203.525.000,00	98,64%
5.2.2.16.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	6.000.000,00	5.975.000,00	99,58%
5.2.2.16.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	160.951.800,00	158.265.000,00	98,33%
5.2.2.18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat studio	51.500.000,00	51.070.000,00	99,17%
5.2.2.18.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat studio visual	51.500.000,00	51.070.000,00	99,17%

5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	560.000.000,00	555.929.000,00	99,27%
5 . 2 . 3 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	560.000.000,00	555.929.000,00	99,27%
5 . 2 . 3 . 01 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	560.000.000,00	555.929.000,00	99,27%
5 . 2 . 4	Belanja Modal jalan, Irigasi dan jaringan	1.100.000.000,00	1.093.466.000,00	99,41%
5 . 2 . 4 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	300.000.000,00	298.586.000,00	99,53%
5 . 2 . 4 . 01 . 27	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	300.000.000,00	298.586.000,00	99,53%
5 . 2 . 4 . 09	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	800.000.000,00	794.880.000,00	99,36%
5 . 2 . 4 . 09 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	800.000.000,00	794.880.000,00	0,00%

2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Dalam melaksanakan urusan **Wajib** di bidang **Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman** selama tahun 2020, OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak mampu melaksanakannya dengan optimal walaupun terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaan diantaranya :

Hambatan dan kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tidak ada.

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2014 tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Demak, penyajian laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Demak adalah berbasis akrual.

Sebagai langkah awal laporan keuangan OPD DINPERKIM tahun 2020 akan disajikan menggunakan basis akrual.

3.1. Entitas Pelaporan

1. Entitas pelaporan unit Pemerintah Daerah yang menurut Peraturan Perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan dalam hal ini adalah OPD DINPERKIM Kabupaten Demak. Laporan keuangan tersebut berupa :
 - Laporan realisasi anggaran
 - Neraca
 - Laporan Operasional
 - Laporan Perubahan Ekuitas
 - Catatan atas Laporan Keuangan
2. Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran / pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan.

3.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan OPD DINPERKIM Kabupaten Demak adalah Basis Akrual.

Basis akrual untuk laporan keuangan berarti bahwa beban, asset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Demak tersebut telah selesai dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

3.3. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Agar laporan dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki maka harus memenuhi prasyarat normatif yaitu :

1. Relevan;
2. Andal;
3. Dapat dibandingkan;
4. Dapat dipahami.

BAB IV
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD

4.1 Laporan Realisasi Anggaran

4.1.1 Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Demak meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah untuk periode 1 Januari sampai 31 Desember 2020.

OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak selama tahun 2020 mengelola Pendapatan Asli Daerah yang diantaranya:

1. Pendapatan Pajak Rp.0,00 dengan pendapatan sebesar Rp.0,00 yang telah disetor ke kas umum daerah sebesar Rp.0,00 Sehingga terdapat kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp.0,00 yang diakui sebagai Pendapatan ditangguhkan.

Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp.0,00 dan terealisasi sebesar Rp.0,00 atau 0 %,

2. Pendapatan Retribusi Daerah dengan pendapatan sebesar Rp. 150.000.000,00 yang telah disetor ke kas umum daerah sebesar Rp. 150.250.000,00 Retribusi Daerah dianggarkan sebesar Rp. 150.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 150.250.000,00 atau sebesar 100,17%. Yang terdiri dari Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan anggaran sebesar Rp. 108.690.250,00 terealisasi sebesar Rp.108.900.000,00 dan retribusi penyediaan dan/ atau penyedotan kakus Rp.41.309.750,00 terealisasi sebesar Rp.41.350.000,00

Dari target anggaran pendapatan asli daerah yang dikelola OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak tahun 2020 melebihi dari target atau sebesar 100,17 %

4.1.2 Belanja

Akun ini menggambarkan Belanja Daerah yang dikelola OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak untuk periode Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan jenis pengelompokannya yaitu Belanja Operasi dan Belanja Modal. Anggaran dan realisasi masing-masing belanja tersebut adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	2020			2019
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI
	BELANJA	64.535.793.998	63.164.038.925	97,87%	94.626.872.139
1	BELANJA OPERASI	62.076.518.998	60.738.823.925	97,85%	86.923.611.139
2	BELANJA MODAL	2.459.275.000	2.425.215.000	98,62%	7.703.261.000

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang / jasa, dengan anggaran dan realisasi TA 2020 sebagai berikut :

NO	URAIAN	2020			2019
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
		(Rp)	(Rp)		
	BELANJA OPERASI	62.076.518.998	60.738.823.925	97,85%	86.923.611.139
1	Belanja Pegawai	8.924.460.390	8.330.484.515	93,34%	7.234.007.472
2	Belanja Barang dan Jasa	53.152.058.608	52.408.339.410	98,60%	79.689.603.667

Belanja operasi dianggarkan sebesar **Rp. 62.076.518.998,00** dan terealisasi sebesar **Rp. 60.738.823.925,00** atau **97,852 %**. Rincian Belanja operasi adalah sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

Akun ini menggambarkan Belanja Pegawai untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 yang meliputi gaji dan tunjangan Pegawai, honorarium PNS/Non PNS, uang lembur, tambahan penghasilan PNS.

NO	URAIAN	2020			2019
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
		(Rp)	(Rp)		
	Belanja Pegawai	8.924.460.390	8.330.484.515	93,34%	7.234.007.472
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	4.279.799.498	4.074.934.709	95,21%	4.155.882.472
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.019.650.000	1.717.039.806	85,02%	1.189.050.000
3	Honorarium PNS	422.600.000	399.950.000	94,64%	249.150.000
4	Honorarium Non PNS	1.930.500.892	1.871.400.000	96,94%	1.370.700.000
5	Uang Lembur	271.910.000	267.160.000	98,25%	269.225.000
6	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/M	-	-		

Belanja pegawai dianggarkan sebesar **Rp. 8.924.460.390,00** dan terealisasi sebesar **Rp.8.330.484.515,00** atau **93,34 %**.

2. Belanja Barang dan Jasa

Akun ini menggambarkan Belanja Barang untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 yang meliputi belanja bahan habis pakai, belanja bahan material, belanja jasa kantor, belanja premi asuransi, belanja perawatan kendaraan, belanja cetak dan penggandaan, biaya sewa, belanja makan / minum, belanja pakaian dinas dan belanja perjalanan dinas, belanja kursus dan pelatihan, belanja jasa konsultansi, belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat.

NO	URAIAN	2020			2019
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI
Belanja Barang dan Jasa		53.152.058.608	52.408.339.410	98,60%	79.689.603.667
1	Belanja Bahan Pakai Habis	750.041.000	730.540.183	97,40%	733.120.250
2	Belanja Jasa Kantor	520.964.800	507.192.221	97,36%	702.334.119
3	Belanja Premi Asuransi	19.384.308	13.067.859	67,41%	17.902.080
4	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	300.000.000	283.316.160	94,44%	231.636.977
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	188.271.500	181.929.500	96,63%	204.774.800
6	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000	3.000.000	100,00%	0
7	Belanja Makanan dan Minuman	480.459.000	420.680.000	87,56%	245.819.500
8	Belanja Pakaian Kerja	127.317.000	119.335.000	93,73%	69.532.500
9	Belanja Perjalanan Dinas	754.666.000	453.047.287	60,03%	516.971.841
10	Belanja Pemeliharaan	591.955.000	580.371.000	98,04%	312.262.800
11	Belanja Jasa Konsultansi	690.000.000	682.360.700	98,89%	303.379.000
12	Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	48.701.000.000	48.408.504.500	99,40%	76.065.287.800

Belanja barang / jasa Tahun anggaran 2020 dianggarkan sebesar

Rp. 53.152.058.608,00 dan direalisasikan sebesar **Rp 52.408.339.410,00** atau **98,60 %**.

b. Belanja Modal

Belanja Modal OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Demak meliputi Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan anggaran dan realisasi TA 2020 sebagai berikut:

NO	URAIAN	2020			2019
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI
BELANJA MODAL		2.459.275.000,00	2.425.215.000,00	98,62%	7.703.261.000
1	Belanja Peralatan dan Mesin	799.275.000,00	775.820.000,00	97,07%	908.509.000
2	Belanja Bangunan dan Gedung	560.000.000,00	555.929.000,00	99,27%	174.032.000
3	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.100.000.000,00	1.093.466.000,00	99,41%	6.620.720.000

Belanja Modal dianggarkan sebesar **Rp. 2.459.275.000,00** dan terealisasi sebesar **Rp. 2.425.215.000,00** atau sebesar **98,62%**.

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Akun ini menggambarkan Belanja Peralatan dan Mesin untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 yang meliputi Alat angkut darat tak bermotor, alat ukur, alat kantor, alat rumah tangga, komputer, alat studio. OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Demak menganggarkan pengadaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp.799.275.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.775.820.000,00 dengan rincian sebagai berikut : (Terlampir)

2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Demak menganggarkan pengadaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 560.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 555.929.000,00 dengan rincian sebagai berikut : (Terlampir)

3. Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan

Akun ini menggambarkan anggaran dan realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 yang meliputi Jalan, Jembatan, Irigasi/ jaringan.

OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Demak menganggarkan pengadaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp.1.100.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.093.466.000,00 dengan rincian sebagai berikut : (Terlampir)

c. Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama

OPD Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Demak tidak mengelola Dana Tugas Pembantuan dan Urusan bersama.

4.2 Laporan Operasional

Laporan operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/ defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif

4.2.1 Pendapatan (LO)

a.Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Demak meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah untuk periode 1 Januari sampai 31 Desember 2020.

OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Demak selama tahun 2020 mengelola Pendapatan Asli Daerah yang diantaranya:

1. OPD DINPERKIM Kab. Demak menetapkan Surat Ketetapan Pajak Daerah pada tahun 2020 sebesar Rp 0,00 dan terealisasi sebesar Rp 0,00 Pembayaran Piutang Pajak Tahun 2020 sebesar Rp 0,00
2. OPD DINPERKIM Kab. Demak selama tahun 2020 mengelola Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp. 150.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.150.250.000,00

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer meliputi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya, Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya dan Bantuan Keuangan.

OPD DINPERKIM Kab. Demak Pendapatan transfer tahun 2020 sebesar Rp.0,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat dan Pendapatan Lainnya

OPD DINPERKIM Kab. Demak pada tahun 2020 Pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Hibah - LO sebesar Rp. 217.849.387.020,00

4.2.2 Beban

Beban meliputi Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, Beban Lain-lain, Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah, Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya, Beban

Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya, Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa, Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya dan Beban Dana Otonomi Khusus untuk periode 1 Januari sampai 31 Desember 2020.

OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak selama tahun 2020 mencatat lima beban yaitu Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Hibah, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyusutan Piutang.

a. Beban Pegawai

Akun ini menggambarkan Beban Pegawai selama periode tahun 2020. Beban Pegawai pada OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak periode tahun 2020 sebesar Rp 8.330.484.515,00

b. Beban Barang dan Jasa

Akun ini menggambarkan Beban Barang dan Jasa selama periode tahun 2020. OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak mencatat Beban barang dan Jasa periode tahun 2020 sebesar Rp. 3.705.120.159,00

c. Beban Hibah

Akun ini menggambarkan Beban Hibah selama periode tahun 2020. OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak mencatat Beban Hibah periode tahun 2020 sebesar Rp. 48.408.504.500,00

d. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Akun ini menggambarkan Beban Penyusutan dan Amortisasi selama periode tahun 2020. OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak mencatat Beban Penyusutan dan Amortisasi periode tahun 2020 sebesar Rp. 2.034.679.833,00

e. Beban Penyisihan Piutang

Akun ini menggambarkan Beban Penyisihan Piutang selama periode tahun 2020. OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak mencatat Beban Penyisihan Piutang periode tahun 2020 sebesar Rp. 1.773.750,00

4.2.3 Kegiatan Non Operasional

Kegiatan non Operasional meliputi Surplus Penjualan Aset Non Lancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya, Defisit Penjualan Aset Non Lancar, Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.

OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak selama tahun 2020 mencatat Kegiatan Non Operasional pada Defisit Penjualan Aset Non Lancar sebesar Rp 3.827.341.670,00

4.2.4 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa meliputi Pendapatan Luar Biasa dan Beban Luar Biasa, OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak selama tahun 2020 mencatat Pos Luar Biasa sebesar Rp 0,00.

4.3 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan yang menyajikan tentang :

4.3.1 Ekuitas Awal

OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak selama tahun 2020 sebesar Rp 7.544.922.855,00

4.3.2. Surplus/defisit-LO

OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak selama tahun 2020 sebesar Rp 151.691.732.593,00

4.3.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar

OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak selama tahun 2020 mencatat Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar pada Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar (Rp 1.635.338.339,00), Koreksi Ekuitas Mutasi OPD Aset Tetap sebesar Rp 13.297.808.042,00, serta Koreksi Ekuitas Mutasi OPD Persediaan sebesar Rp 1.384.500,00

4.3.4. Kewajiban untuk Dikonsolidasikan

OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak selama tahun 2020 sebesar Rp 63.013.788.925,00.

4.3.5. Ekuitas Akhir

OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak selama tahun 2020 sebesar Rp 237.428.968,00

4.4 Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

4.4.4 Aset

Jumlah Aset sebesar Rp 233.914.298.576,00 terdiri dari Aset lancar sebesar Rp 5.762.250,00 Investasi Jangka panjang sebesar Rp 0,00, Aset tetap sebesar Rp 232.500.193.091,00 serta Aset lainnya sebesar Rp 1.408.343.235,00

a. Aset Lancar

Aset lancar meliputi Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas di Bendahara FKTP, Kas di Bendahara Bos, Kas Lainnya, Setara Kas, Invenstasi Jangka Pendek, Piutang Pendapatan, Piutang Lainnya, Penyisihan Piutang, Beban Dibayar Dimuka, Persediaan.

1) Kas dan Setara Kas

Per. 31 Desember 2020 saldo kas di bendahara pengeluaran adalah sebesar Rp.0,00, dimana sisa Uang Persediaan telah di setor ke kas daerah. Sedangkan Saldo kas dibendahara penerimaan sebesar Rp 0,00.

2) Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan / atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian / atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Per. 31 Desember 2020 Saldo Piutang Pendapatan OPD DINPERKIM Kab. Demak adalah sebesar Rp.7.095.000,00

3) Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang Per. 31 Desember 2020 sebesar Rp 1.773.750,00

- **. Penyisihan Piutang Pajak**

Penyisihan Piutang Pajak Per. 31 Desember 2020 sebesar Rp 0,00 dari Jumlah Piutang Pajak sebesar Rp 0,00 sehingga Piutang Pajak yang mungkin dapat ditagih sebesar Rp 0,00.

- **. Penyisihan Piutang Lainnya**

Penyisihan Piutang Per. 31 Desember 2020 sebesar Rp 0,00 dari Jumlah Piutang sebesar Rp 0,00.

- **Beban dibayar dimuka**

akun ini menjelaskan suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah. Per. 31 Desember 2020 OPD DINPERKIM Kab. Demak mencatat beban dibayar dimuka sebesar Rp 0,00.

4) Persediaan

Persediaan Per. 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp 411.000,00

Per. 31 Desember 2020 OPD DINPERKIM Kab. Demak telah melakukan opname fisik atas persediaan barang /bahan dengan rincian sebagai berikut :

Daftar Persediaan Barang Tahun 2020

NO.	Nama Barang	Saldo Akhir Per 31 Desember 2020			Ket.
		Satuan	Hrg. Satuan	Jumlah	
1	HVS Folio Berwarna 70 gr	7 Rim	Rp 63.000,00	Rp 441.000,00	

Persediaan Per. 31 Desember 2020 sebesar Rp. 441.000,-

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang meliputi Investasi jangka panjang non Permanen dan Investasi Jangka Panjang Permanen, OPD

DINPERKIM Kabupaten Demak selama tahun 2020 sebesar Rp 0,00.

c. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap OPD DINPERKIM Kab. Demak per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 232.500.193.091,00 dan Rp. 3.762.711.748,00 Adapun rincian aset tetap sebagai berikut:

NO	URAIAN	PER 31 /12/ 2020	PER 31 /12/ 2019
1	Tanah	203.271.156.331,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	5.700.571.791,00	5.587.214.451,00
3	Gedung dan Bangunan	1.523.190.000,00	99.790.000,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	28.107.924.367,00	0,00
5	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	1.150.115.526,00
7	Akumulasi Penyusutan	(6.102.649.389,00)	(3.074.408.229,00)
	JUMLAH ASET TETAP	232.500.193.091,00	3.762.711.748,00

1) Tanah

OPD DINPERKIM Kab. Demak Per. 31 Desember 2020 mencatat aset tanah sebesar Rp.203.271.156.331,00 terdiri dari Fasum dan Fasos dari Pihak ketiga Pengembang / Developer Perumahan di Kabupaten Demak sebesar Rp 190.889.024.331,00 dan dari mutasi tambah dari OPD DINPUTARU sebesar Rp 12.382.132.000,00 secara rinci dapat dijelaskan sbb:

TANAH	
Saldo per 31/12/2019	00.00
Penambahan tahun 2020	
Mutasi tmbah Pihak III	190,889,024,331.00
Mutasi tambah OPD	12,382,132,000.00
<i>Jumlah Penambahan</i>	203,271,156,331.00
Saldo per 31/12/2020	203,271,156,331.00

2) Peralatan dan Mesin

Per. 31 Desember 2020, OPD DINPERKIM Kab. Demak membukukan Aset peralatan dan mesin sebesar Rp. 5.700.571.791,00 naik sebesar Rp. 113.357.340,00 dari tahun 2019

Penambahan aset peralatan dan mesin bersumber dari pengadaan belanja modal sebesar Rp.775.820.000 serta ekstrakomptabel sebesar Rp 4.148.000,00.

Sedangkan pengurangan atas aset peralatan dan mesin bersumber dari penghapusan Rp. 512.948.274,00 pengurangan karena mutasi aset ke

OPD keluar sebesar Rp. 5.890.636,00 serta aset lainnya sebesar Rp.147.771.750,00,00. secara rinci dapat dijelaskan sbb:

PERALATAN DAN MESIN		
Saldo per 31/12/2019		5,587,214,451.00
Penambahan tahun 2020		
	Belanja Modal	775,820,000.00
	Ekstra Komptabel	4,148,000.00
	<i>Jumlah Penambahan</i>	779,968,000.00
Pengurangan tahun 2020		
	Penghapusan	512,948,274.00
	Mutasi OPD Keluar	5,890,636.00
	Aset lainnya	147,771,750.00
	<i>Jumlah Pengurangan</i>	666,610,660.00
Saldo per 31/12/2020		5,700,571,791.00

3) Gedung dan Bangunan

Per. 31 Desember 2020, OPD DINPERKIM Kab. Demak membukukan Aset gedung dan bangunan sebesar Rp.1,523,190,000,00 .

Penambahan aset bangunan dan gedung bersumber dari pengadaan belanja modal sebesar Rp. 555.929.000,00 penambahan dari Mutasi Pihak ketiga sebesar Rp 233.400.000,00, Mutasi OPD tambah sebesar Rp. 1.190.000.000,- koreksi tambah sebesar Rp. 436.580.370,00

Sedangkan pengurangan atas aset bangunan dan gedung bersumber dari Mutasi OPD Keluar sebesar Rp. 555.929.000,00 serta Aset Lainnya sebesar Rp. 436.580.370,00 secara rinci dapat dijelaskan sbb:

GEDUNG DAN BANGUNAN		
Saldo per 31/12/2019		99,790,000.00
Penambahan tahun 2020		
	Belanja Modal	555,929,000.00
	Mutasi OPD Tambah	1,190,000,000.00
	Mutasi Tambah Pihak III	233,400,000.00
	Koreksi tambah	436,580,370.00
	<i>Jumlah Penambahan</i>	2,415,909,370.00
Pengurangan tahun 2020		
	Mutasi OPD Keluar	555,929,000.00
	Aset Lainnya	436,580,370.00
	<i>Jumlah Pengurangan</i>	992,509,370.00
Saldo per 31/12/2020		1,523,190,000.00

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Per. 31 Desember 2020, OPD DINPERKIM Kab. Demak membukukan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp.28.107.924.367,00

Penambahan aset jalan, irigasi dan jaringan bersumber dari pengadaan belanja modal sebesar Rp. 1.093.466.000,00 penambahan dari Mutasi Pihak ketiga sebesar Rp 26.726.962.689,00, Mutasi OPD tambah sebesar Rp. 1.380.961.678,00 koreksi tambah sebesar Rp. 713.535.156,00, Aset lainnya Rp 3.091.403.844,00

Sedangkan pengurangan atas aset jalan, irigasi dan jaringan bersumber dari Mutasi OPD Keluar sebesar Rp. 1.093.466.000,00 serta Penghapusan sebesar Rp. 3.804.939.000,00 secara rinci dapat dijelaskan sbb:

JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN		
Saldo per 31/12/2019		00.00
Penambahan tahun 2020		
	Belanja Modal	1,093,466,000.00
	Mutasi OPD Tambah	1,380,961,678.00
	Mutasi Tambah Pihak III	26,726,962,689,00
	Aset lainnya	3,091,403,844.00
	Koreksi tambah	713,535,156.00
	<i>Jumlah Penambahan</i>	33,006,329,367.00
Pengurangan tahun 2020		
	Mutasi OPD Keluar	1,093,466,000.00
	Penghapusan	3,804,939,000.00
	<i>Jumlah Pengurangan</i>	4,898,405,000.00
Saldo per 31/12/2020		28,107,924,367.00

5) Aset Tetap Lainnya

Per. 31 Desember 2020, OPD DINPERKIM Kab. Demak membukukan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 0,00

6) Konstruksi dalam Pekerjaan

Per. 31 Desember 2020, OPD DINPERKIM Kab. Demak membukukan Aset Konstruksi dalam pekerjaan sebesar Rp. 0,00

7) Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan Per. 31 Desember 2020 sebesar Rp. 6.102.649.398,00 secara rinci dijelaskan dalam tabel berikut : (Terlampir)

d. Aset Lainnya

Rekening ini menggambarkan nilai perolehan dan/atau nilai realisasi bersih atas aset yang dimiliki/ dikuasai dan/ atau menjadi hak Pemerintah Kabupaten Demak per 31 Desember 2020, yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok aset tetap. Jumlah aset lainnya terdiri dari Aset tidak berwujud Rp 262.559.916,00 dan Aset lain – lain sebesar Rp 1.150.115.526,00

4.4.5 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Per. 31 Desember 2020 OPD DINPERKIM Kab. Demak membukukan kewajiban sebagai berikut :

a. Kewajiban Jangka Pendek

Rekening ini menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun. Per. 31 Desember 2020 OPD DINPERKIM Kab. Demak membukukan kewajiban jangka pendek sebesar Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :

1) Utang PFK

Secara rinci dapat dijelaskan bahwa utang PFK terdiri dari :

- Utang PPN sebesar Rp.0,00
- Utang PPh. 21 sebesar Rp.0,00
- Utang PPh. 22 sebesar Rp.0,00 dll.

2) Utang bunga

3) Pendapatan diterima dimuka

Per. 31 Desember 2020 OPD DINPERKIM Kab. Demak .mencatat Pendapatan diterima dimuka sebesar Rp. 0,00

4) Utang beban

Utang beban pada OPD DINPERKIM Kab. Demak terdiri dari :

- Utang beban Listrik PLN sebesar Rp. 0,00
- Utang beban Air PDAM sebesar Rp. 0,00
- Utang beban Telpon sebesar Rp. 807.730,00

Untuk beban Listrik PLN dan beban Air PDAM pada OPD DINPERKIM masih menyatu dengan OPD DINPUTARU.

5) Utang Jangka Pendek Lainnya :

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah jenis utang yang tidak dapat diklasifikasikan dalam klasifikasi utang jangka pendek sebagaimana telah didefinisikan sebelumnya

b. Kewajiban Jangka Panjang

Rekening ini menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang jatuh tempo lebih dari satu tahun anggaran. Per. 31 Desember 2020 OPD DINPERKIM Kab. Demak Pemerintah Kabupaten Demak tidak memiliki Kewajiban Jangka Panjang

4.4.6 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Per. 31 Desember 2020 Ekuitas dibukukan sebesar Rp. **233.917.823.053,00**

BAB V

PENJELASAN ATAS INFORMASI - INFORMASI NON KEUANGAN

Berdasarkan peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, OPD DINPERKIM Kabupaten Demak terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
3. Kasubag Umum dan Kepegawaian
4. Kasubag Program dan Keuangan
5. Kabid Perumahan
6. Kasi Pembangunan Perumahan
7. Kasi Pengembangan dan Pengelolaan Sanitasi
8. Kasi Kebersihan
9. Kabid Pengembangan Kawasan Permukiman
10. Kasi Penyediaan Infrastruktur Permukiman
11. Kasi Penataan Lingkungan Permukiman
12. Kasi Pengembangan Sistem dan Penyediaan Air Minum

Adapun Visi dan Misi OPD DINPERKIM Kabupaten Demak adalah :

Visi :

Terwujudnya Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak yang Layak, Sehat, Nyaman dan Berkelanjutan

Misi :

1. Memaksimalkan dan mensinergikan tupoksi Aparatur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan *stakeholder* lain yang terkait
3. Mengurangi luasan permukiman kumuh di perkotaan dan perdesaan
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana permukiman yang berbasis masyarakat
5. Membangun sistem pengawasan bangunan yang efektif dan efisien

BAB VI

PENUTUP

Demikian beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan, yang merupakan laporan dengan penjelasan secara naratif, analisis atau daftar terinci memuat Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Diharapkan dapat membantu mempermudah pemahaman pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja OPD DINPERKIM Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020.